

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam suatu Negara adalah setiap Negara giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan berdasarkan konsep *Good Governance*. *Good Governance* merupakan suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usah. Menurut Bank Dunia yang di kutip Wahab (2002:34). *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaraan salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan. Selain itu bank dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor dan masyarakat (effendi, 1996 :47).

Good Government Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia

mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011 :3).

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Good Governance sendiri sudah diterapkan di Indonesia sejak era reformasi. Namun, seiring perkembangannya, pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil karena masih memiliki sejumlah kendala terutama dalam pengelolaan anggaran dana dan akuntansi yang keduanya merupakan produk penting dari *Good Governance*. Dalam hal ini di perlukan transparansi informasi

yang lebih mendalam terhadap publik, khususnya mengenai APBN sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan dan pengawasan terhadap APBN dan BUMN.

“Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akutabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.”

(Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000)

Menerapkan *Good Governance* di Indonesia dapat memberikan dampak positif bukan hanya untuk sistem pemerintah namun juga untuk badan usaha non pemerintah lainnya. *Good governance* ini sedang menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. *Good governance* sebagai bagian agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan Desa. Advokasi tentang penyelenggaraan atau tata kelola Pemerintahan Desa yang baik sangatlah mendesak

untuk dilakukan. Sungguhpun demikian, urgensinya sangat jarang dikomunikasikan di arena publik. Perhatian terhadap Pemerintahan Desa, walaupun ada, bersifat marginal. Padahal, justru pada level desa inilah interface atau sentuhan negara-rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak terjadi. Ruang publik yang paling dekat untuk diakses masyarakat justru ada dan perlu diperluas pada level desa.

Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi sosial masyarakat, dimana kondisi ekonomi di Babakan Peuteuy juga bisa menjadi permasalahan *good governance* di Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka. Banyak masalah sosial yang muncul di masyarakat akibat krisis ekonomi yang jika tidak segera diatasi bisa mengganggu kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Adapun kondisi sosial yang dimana, sebagai salah satu wujud nyata dari berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintahan yang diterapkan yaitu adanya masyarakat yang solid dan secara aktif berpartisipasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan sebuah negara. Masyarakat diharapkan juga melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pada kenyataannya masyarakat masih tidak berdaya di depan negara dan masih ada banyak sekali contoh konflik sosial dalam masyarakat yang terjadi di Indonesia, seperti konflik antar suku, anarkisme kelompok dan lain sebagainya yang menjadi permasalahan *Good Governance* di Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka.

Penelitian ini menggunakan obyek pemerintahan daerah di Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Hal yang mendorong peneliti melakukan penelitian karena peneliti ingin mengetahui pengetahuan dan

pemahaman pegawai tentang pentingnya *Good Governance* yang dipengaruhi oleh pengendalian intern dan komitmen organisasi. Penelitian yang terkait dengan *Good Governance* memang banyak tetapi penelitian mengenai pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap *Good Governance* khususnya Desa Babakan Peuteuy belum pernah dilakukan karena penelitian yang diangkat lebih banyak mengarah pada pengelolaan keuangan daerah, anggaran daerah, kinerja, budaya organisasi dan *Total Quality Management* serta penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Governance* belum pernah dilakukan.

Tantangan dalam merealisasikan tujuan Penerapan *Good Governance* sangatlah sulit, mengingat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang panjang telah tercemar berbagai bentuk praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Good governance adalah bukan tujuan akan tetapi merupakan metode atau cara untuk menjalankan suatu tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu indikatornya sangat variatif dan tidak mutlak, sangat tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan budaya daerahnya masing-masing. Sehingga Penerapan *Good Governance* antara daerah satu dengan yang lain stressing-nya bisa berbeda-beda. Sebenarnya penerapan *Good Governance* dalam Pemerintahan Daerah adalah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda lagi jika ingin daerah tersebut maju dan masyarakatnya sejahtera. Namun demikian sampai sekarang tampaknya masih akan menemui berbagai kendala baik yang bersifat struktural maupun kultural (Said dan Widiyahseno, 2005).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka peneliti memilih judul **Penerapan *Good Governance* di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu, peneliti hanya menemukan satu penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Selamat, Melani D (2020)	Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)	Penerapan prinsip partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun program-program yang akan ditempuh Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar masih kurang optimal. Dalam hal ini masyarakat masih kurang dilibatkan, akibatnya kebijakan atau program yang ditempuh oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2	Sugiyanto, Eviatiwi K (2019)	Gaya Kepemimpinan Dan <i>Good Governance</i> Sebagai Upaya	Prinsip <i>Good Governance</i> dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan kepercayaan

		Peningkatan <i>Excellent Service</i> Dan Kepercayaan Masyarakat (Studi Kasus Dinperindag Jawa Tengah)	publik, serta gaya kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kepercayaan publik.
3	Munaf, Yusri (2020)	Penerapan <i>Good Governance</i> Di Kecamatan Marpyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan)	dimensi akuntabilitas masih ditemukan kelemahan yaitu ketidak pastian waktu pelayanan, masih kurangnya kedisiplinan pegawai, dan masih ditemukan ketidakadilan perlakuan.

Sumber: hasil kajian peneliti, 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Selamat, Melani D (2020) dengan judul Penerapan *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) membahas tentang penerapan prinsip partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun program-program yang akan ditempuh. Perbedaannya adalah peneliti membahas kurangnya perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi sosial masyarakat, dimana kondisi ekonomi menjadi permasalahan *Good Governance* di Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka. Sedangkan persamaannya adalah teori yang di gunakan yaitu menggunakan teori mardiasmo (2010) tentang Prinsip-prinsip *Good Governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto, Eviatiwi K (2019) dengan judul Penerapan *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) membahas tentang Prinsip *Good Governance* dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan kepercayaan publik, serta gaya kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kepercayaan publik. Perbedaannya adalah peneliti tidak hanya

membahas tentang kinerja pelayanan dan gaya kepemimpinan, tetapi membahas seluruh aspek yaitu kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Munaf, Yusri (2020) dengan judul Penerapan *Good Governance* Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan) membahas tentang dimensi akuntabilitas masih ditemukan kelemahan yaitu ketidak pastian waktu pelayanan, masih kurangnya kedisiplinan pegawai, dan masih ditemukan ketidakadilan perlakuan. Sedangkan peneliti membahas tentang peneliti membahas kurangnya perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi sosial masyarakat, dimana kondisi ekonomi menjadi permasalahan *Good Governance*. teori yang digunakan dengan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang kinerja pelayanan, sosial dan ekonomi masyarakat demi terwujudnya *Good Governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Penerapan *Good Governance* di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dilihat dari aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan *Value For Money*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan *good governance* di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Transparansi Informasi di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
2. Untuk menganalisa Partisipasi Masyarakat di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
3. Untuk memaparkan Akuntabilitas Administrasi di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
4. Untuk menjelaskan *Value For Money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) Pembangunan yang baik di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bidang ilmu pengetahuan terutama pada bidang *Good Governance* dan juga diharapkan dapat memberikan ilmu di bidang Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan terhadap Penerapan *Good Governance* Sebagai Upaya Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan mengenai *Good Governance* sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur Penerapan *Good Governance* Sebagai Upaya Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan juga menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya karena masih terbatasnya penelitian. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti yang mengerjakan penelitian yang kemungkinan sama.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan mengenai *Good Governance* agar dapat meningkatkan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.